



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2017-2018
KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TANGGAL 30 OKTOBER S.D. 3 NOVEMBER 2017**



JAKARTA 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka Komisi VIII DPR RI dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 telah membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja, yaitu : Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Papua.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara ini didasarkan atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata Tertib
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 23 Agustus 2017

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah dan dengan pelaksanaan pembangunan dibidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat, serta dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau stakeholder yang berkaitan dengan keseluruhan bidang tersebut, meliputi: Pimpinan Agama, NGO, Kelompok Penyandang cacat, lembaga sosial, dan lainnya.
- b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

2. Tujuan

Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya pembangunan di bidang Agama, Sosial, penanggulangan Bencana, perempuan dan anak

D. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ini berlangsung dari tanggal 30 Oktober s.d. 3 November 2017

BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN

A. DAFTAR NAMA TIM KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Utara ini diikuti oleh Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR ANGG. /FRAKSI
1.	Dr. Ir.HD Sodik Mudjahid, M.Sc	Wakil Ketua	A-256/F-PG
2.	H. Abdul Malik Haramain, MSi	Wakil Ketua	A-64/F-PKB
3.	Prof. Dr.H.Hamka Haq, MA	Anggota	A-191/F-PDIP
4.	Mochammad Hasbi Asyidiki Jayabaya	Anggota	A-205/F-PDIP
5.	Drs. H. Samsu Niang, M.Pd	Anggota	A-227/FPDIP
6.	Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH	Anggota	A-261/FPG
7.	Pdt.Elion Numberi, STH	Anggota	A-322/FPG
8.	Dra. Hj Ruskati Ali Baal	Anggota	A-394/F-GER
9.	H. Syofwatillah Mohzaib, S.Sos.I	Anggota	A-407/FPD
10.	Siti Mufattahah, B.COM	Anggota	A-422/F-PD
11.	Hj. Desy Ratnasari, MSi , MPsi	Anggota	A-472/FPAN
12.	H. An'im F. Mahrus	Anggota	A-70/F-PKB
13.	Dr. KH. Surahman Hidayat, MA	Anggota	A-107/FPKS
14.	Achmad Mustaqim, SP,MM	Anggota	A-526/F-PPP
15.	H. Abdul Halim, SH	Anggota	A-533/FPPP
16.	Drs. Hasan Aminuddin, MSi	Anggota	A-18/F-NASDEM
17.	Samsudin Siregar, SH	Anggota	A-547/F-HAN
18.	Sumarman, S.Sos.	Sekretariat	
19.	Yusup Kamaludin	Sekretariat	
20.	Raka Ikhsan Alwi	Staf	
21.	Dr. Astriana Baiti Sinaga MS	Tenaga Ahli	
22.	Eka Hindra	Photografer	

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan ke P2TP2A Kota Tarakan,** Provinsi Kalimantan Utara. Ikut serta bersama Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI, Bapak Sekda Provinsi Kaltara, Walikota Kaltara, SKPD terkait dan mitra kerja Komisi VIII DPR RI. Dari hasil peninjauan ke P2TP2A Kota Kaltara ditemukan beberapa masalah antara lain:
 - a. Kasus yang paling banyak terjadi di kota Tarakan, adalah kasus kekerasan, kasus yang terbaru terjadi sebanyak 34 kasus.
 - b. Setelah kasus kekerasan maka kasus narkoba menempati kasus tertinggi ke dua yang tidak hanya pada anak dan remaja tetapi ibu ibu.
 - c. Kendala yang dialami selama ini dalam kasus pelayanan buat korban kekerasan baik perempuan dan anak adalah persoalan rumah aman perempuan dan shelter tempat rehabilitasi sosial anak, yang sangat tidak laik sarannya.
 - d. Kendali lain yang dialami juga dalam penanganan tindak kekerasan baik fisik maupun seks adalah keterbatasan dana untuk visum sebagai dasar pelaporan kepada polisi.
 - e. Berbagai kasus yang terjadi di P2TP2A khususnya kekerasan secara lengkap beserta kronologisnya sebenarnya secara online sudah terakses di e Simpony data KPPA namun untuk kasus terkait dengan Anak berhadapan dengan hukum (ABH) e Simpony tidak memberikan layanan untuk itu.

- 2. Peninjauan Kunker Reses Komisi VIII DPR RI ke gudang Logistik BPBD Kota Tarakan.** Dari penjelasan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Kota Tarakan, ada beberapa masalah antara lain:
 - a. Kota Tarakan termasuk rawan bencana banjir, dan longsor, pohon tumbang, kecelakaan laut, gempa serta abrasi pantai.
 - b. Terkait dengan shelter buat para pengungsi juga belum dimiliki.
 - c. Kota Tarakan ini adalah pintu gerbang penduduk dari manapun menuju kabupaten/kota lainnya dan masyarakat juga memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan tambak laut, sehingga apabila terjadi kecelakaan di laut maka akan sulit melakukan tindakan kecepatan karena membutuhkan waktu yang lebih lambat dan wilayah kerja untuk BPBD juga dibatasi. Konsideran inilah kemudian diusulkan untuk membuat pos laut atau barak bencana serba guna yang berada di laut agar evakuasi kecelakaan laut segera diatasi.
 - d. Kantor BPBD Kota Tarakan juga belum ada sehingga mengusulkan untuk diadakannya gedung untuk kantor BPBD termasuk juga juga untuk dapur logistic BPBD.

- 3. Pertemuan Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI bersama Sekda, Walikota Tarakan, Pimpinan DPRD, KABINDA, BNN, serta SKPD lainnya, di Kantor**

serba Guna, kota Tarakan. Berdasarkan penjelasan dari Sekda, dan SKPD lainnya, ada beberapa hal yang menjadi catatan antara lain:

a. Bidang Perempuan dan Anak yakni:

- 1) Kaltara membentuk perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dengan tujuan agar ada gerakan yang cepat untuk mengintegrasikan penanganan kekerasan terhadap anak yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, saat ini yang sudah ada di 2 Kabupaten, yakni Bulungan dan Nunukan
- 2) Pada Tahun 2018 Kaltara akan membentuk Tim Reaksi Cepat agar lebih cepat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama di daerah yang rawan dan tinggi terhadap perempuan dan anak.
- 3) Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltara mencapai 447 Kasus
- 4) Pelaksanaan PPPA masih membutuhkan dana dekonsentrasi dan dana APBD ditingkatkan sehingga program dan kegiatan dapat terealisasi sesuai target yang ditentukan.
- 5) Hambatan yang masih dirasakan dalam pelaksanaan PPPA adalah kurangnya dukungan dari lintas sector yang terkait dan kurangnya sinergitas antar lintas program dan sektor.

b. Bidang Agama

- 1) Berbagai permasalahan yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltara: belum memiliki gedung sendiri masih menyewa dan belum memiliki lokasi tanah sendiri, SDM sangat terbatas baru memiliki 53 Pegawai, anggaran operasional sangat terbatas, masih sulit untuk penegerian madrasah, masih sulit mensertifikasi tanah wakaf.
- 2) Mengusulkan pembangunan asrama haji Transit Tarakan. Asrama haji Transit Tarakan memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan haji di Tarakan saat ini sudah tersedia lahan seluas 3 H.
- 3) Belum semua kecamatan memiliki KUA dari 30 KUA baru 13 yang memiliki KUA.

c. Bidang Sosial

- 1) Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2017 sebanyak 49,47 ribu (7,22 persen). Pada September 2016 penduduk miskin berjumlah 47,03 ribu (6,99 persen), berarti jumlah penduduk miskin bertambah 2,44 ribu orang atau bertambah 0,23 persen. Selama periode September 2016 – Maret 2017, penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,77 ribu orang dan di daerah perdesaan juga naik sebanyak 1,67 ribu orang. Pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebanyak 31,45 ribu orang (10,78 persen), lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan sebanyak 18,02 ribu orang (4,59 persen).

- 2) Program bantuan sosial 2017 bagi Kaltara, Kemensos mengucurkan dana total sebesar Rp 48,330 miliar. Persebarannya, untuk PKH Rp 16,085 miliar, Rastra Rp 31,664 miliar, Bantuan Sosial Disabilitas Rp 150 juta, Bantuan Sosial Lanjut Usia Rp 220 juta, Bantuan Sosial KUBE Rp 140 juta, dan Bantuan Sosial e-Warong Rp 70 juta
- 3) Permasalahan Sosial lain yang dominan adalah Narkoba, yang mayoritas penyebabnya adalah permasalahan ekonomi dan gaya hidup. Dalam konteks rehabilitasi sosial terhadap para pengguna Narkoba yang kebanyakan ibu-ibu maka rehabilitasi sosial ini menjadi perhatian yang sangat penting.

4. Peninjauan Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI ke Lokasi Asrama Haji Transit Kaltara, dimana sudah tersedia lahan seluas 3 H.

5. Peninjauan Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI ke lokasi e-warong yang baru satu bulan dilaksanakan sekaligus memberikan bantuan kepada penerima PKH

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan tugasnya di bidang Pengawasan, terdapat beberapa kesimpulan saran sebagai berikut :

1. Terkait dengan Pembangunan asrama Haji Transit Provinsi Kaltara maka Komisi VIII DPR RI meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kaltara segera mengusulkan proposal rencana Pembangunannya kepada Kementerian Agama RI.
2. Terkait dengan Pembangunan Gedung Kantor BPBD maka perlu dilakukan komunikasi antara Pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri.
3. Berbagai perencanaan terkait Barak layanan terpadu laut atau Pos laut maka perlu berkoordinasi dengan BNPB.
4. Terkait dengan penanganan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup kekerasan, narkoba, dll maka perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lintas sektor maupun diantara pusat dan daerah.

**BAB IV
PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja ini dibuat, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Komisi VIII DPR RI bersama mitra.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA TIM**

ttd

Dr. Ir.H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc